

ISBN 978-602-73690-3-0

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

*“Peran RISTEK dalam Meningkatkan  
Daya Saing Bangsa di Era Global”*

1



**Universitas PGRI Yogyakarta**

Yogyakarta, 19 Desember 2015



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

**“Peran RISTEK dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa di Era Global”**

Hak Cipta©Universitas PGRI Yogyakarta  
ISBN: 978-602-73690-3-0

**Tim Reviewer :**

1. Prof. Dr. Didik Indradewa, Dip.Agr.Sc (UGM)
2. Dr. Sofwatul Uyun (UIN Sunan Kalijaga)
3. Arief Rahman, SIP, SE, M.Com, Ph.D (UII)
4. Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd (UPY)

**Tim Editor:**

1. Dra. Suharni, M.Pd
2. Tri Siwi Nugrahani, M.Si
3. Laela Sagita, M.Sc
4. Marti Widya Sari, M.Eng
5. C. Tri Kusumastuti, M.P

**Desain Cover:**

Ikhsan Marda Saputra

**Penerbit:**

UPY Press

**Alamat Redaksi:**

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta  
Telp (0274) 376808, 373198,418077, Fax (0274) 376808  
Email: [upypress@gmail.com](mailto:upypress@gmail.com)

Cetakan Pertama, Desember 2015



## PERAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DI ERA GLOBAL

Oleh : Buchory Muh Sukemi \*)

### A. PENDAHULUAN

Tahun-2045 yang akan datang merupakan tahun yang istimewa bagi bangsa Indonesia, karena kita memperingati satu abad kemerdekaan negara ini. Sumberdaya manusia waktu itu adalah putera-puteri yang dilahirkan pada saat ini maupun yang sedang duduk di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun tersebut mereka berada pada usia produktif yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia. Lembaga yang harus mempersiapkan generasi produktif itu tidak lain adalah lembaga pendidikan yang mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan sejak pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Dalam perjalanan mencapai Tahun 2045, tingkat pendidikan bangsa Indonesia tentu sudah lebih meningkat di tengah-tengah percaturan global yang berubah dengan sangat cepat. Oleh sebab itu lembaga pendidikan harus mentransformasikan dirinya sanggup mempersiapkan dan mempertahankan eksistensi bangsanya. Disinilah letak peran strategis institusi pendidikan termasuk pendidikan tinggi di Indonesia dalam mempersiapkan generasi emas 2045.

Pada saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 253,6 juta jiwa, dan menempati urutan jumlah penduduk terbanyak ke empat setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2035, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai lebih dari 305 Juta jiwa. Apabila dilihat dari komposisi umur penduduk Indonesia, memiliki struktur demografi yang baik, karena terkonsentrasi pada penduduk usia produktif, yaitu sekitar 15 – 64 tahun. Komposisi penduduk yang berusia produktif sebesar 67,9 % dari semua jumlah penduduk dan kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 66,5 %. Adanya Jumlah penduduk berusia produktif tersebut, kemudian diikuti dengan pengurangan angka dependency ratio menjadi 47,3 %. Menurunnya angka rasio beban ketergantungan tersebut menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk usia produktif yang harus menanggung jumlah penduduk yang tidak produktif.

Pada tahun 2019 yang akan datang, jumlah penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai jumlah 7,5 milyar jiwa. Dalam kondisi demikian berarti kebutuhan hidup manusia di planet bumi ini akan makin berlipat ganda dibandingkan dengan kebutuhan saat ini. Angka rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif di Indonesia terus menunjukkan penurunan sampai mencapai angka terendah pada tahun 2030. Dengan demikian selama 15 tahun ke depan merupakan tahun emas bagi negara Indonesia karena pertumbuhan ekonominya berkembang dengan baik. Sementara itu negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, data penduduknya terdiri atas jumlah penduduk yang berusia tua sehingga rasio beban ketergantungannya menjadi tinggi.

Pada tahun 2030, dalam prediksi McKinsey Global Institute (2012), negara Indonesia akan menjadi negara dengan economic size nomor tujuh terbesar di dunia. Selanjutnya Mc Kinsey Global Institute menjelaskan berbagai potensi maupun peluang yang tersedia bagi bangsa dan negara Indonesia maupun tantangan dan problematika yang dihadapi. Sementara itu pada tahun 2015 ini ekonomi negara Indonesia berada pada urutan ke-16 besar dunia. Dalam kenyataannya adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini hanya berkisar 5,01 % dapat mengakibatkan prediksi Mc Kinsey Global Institute tersebut menjadi berkurang validitasnya.

---

\*) Guru Besar dan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta



Apabila dicermati tujuan pendidikan nasional, pada hakekatnya adalah mengembangkan kecerdasan manusia Indonesia bukan dalam arti pengembangan intelektualitas semata, tetapi bersifat multi kecerdasan. Hal ini sesuai dengan yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, dan semboyan “Suci Tata Ngesti Tunggal” yang berarti suci batinnya, tertib lahirnya, luhur maksudnya dan sempurna tujuannya. Inilah tujuan pendidikan sesuai dengan jiwa UUD 1945. Menghadapi perubahan pada era global seyogyanya tujuan pendidikan nasional kembali ke jiwa UUD 1945 yang menekankan pada peningkatan kemampuan peserta didik yang merdeka, yang mempunyai identitas dan jiwa nasionalisme dalam menghadapi perubahan yang pesat. Terwujudnya tujuan pendidikan nasional tersebut dapat meningkatkan daya saing bangsa di era global sekaligus tetap berjati diri dan berkepribadian Indonesia.

## B. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Menurut sejarahnya, pada saat diselenggarakan KTT di Bali tahun 1967, negara-negara ASEAN mengangkat masalah ekonomi menjadi bagian yang harus diperhatikan bersama. Untuk itu, negara-negara anggota perlu memperkokoh kerjasama ekonomi ASEAN dengan menentukan strategi agar perkembangan ekonomi berjalan lebih cepat. Sekitar 40 tahun kemudian, para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 tahun 2007 di Singapura, menyepakati *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*, sebagai acuan seluruh negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen AEC atau MEA. Melalui cetak biru MEA, ASEAN telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Seperti dengan melaksanakan pembangunan fasilitas perdagangan pada sektor informasi, teknologi, transportasi, dan pengimplementasian *ASEAN Single window* di masing-masing Negara, serta harmonisasi kebijakan sertifikasi produk buatan ASEAN.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam implementasinya, MEA menetapkan 12 sektor prioritas yang disebut *free flow of skilled labor* ( arus bebas tenaga kerja terampil). Ke-12 sektor terampil itu adalah untuk perawatan kesehatan (*health care*), turisme (*tourism*), jasa logistik (*logistic services*) e-ASEAN, jasa angkutan udara (*air travel transport*), produk berbasis agro (*agrobased products*), barang-barang elektronik (*electronics*), perikanan (*fisheries*), produk berbasis karet (*rubber based products*), tekstil dan pakaian (*textiles and appareles*), otomotif (*otomotive*), dan produk berbasis kayu (*wood based products*).

Pada tahun 2014 yang lalu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 37/2014 yang memuat banyak indikator yang harus dicapai dalam upaya meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi MEA 2015. Disamping itu juga diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 6/2014, tentang peningkatan daya saing menghadapi MEA, bahkan pemerintah Indonesia sudah menyiapkan pengembangan sektor industri, agar bisa bersaing di pasar bebas ASEAN tersebut. Seperti upaya pengembangan industri perbankan yang masuk dalam 10 pengembangan industri yang harus diantar ke gerbang pasar bebas dengan semua keunggulannya. Menjelang penerapan MEA, semua sektor memang harus dihadapi, siap tidak siap semua industri dan jasa di Indonesia tidak hanya harus menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi juga harus memperlebar ekspansinya ke negara ASEAN lainnya. Oleh karenanya, semua sektor tersebut perlu dan harus merancang *roadmap* secara terperinci agar dapat menjadi arah yang lebih jelas dalam konsolidasi secara nasional dalam negeri, sehingga dapat berperan aktif dalam mengantisipasi berlakunya MEA 2015. Era pasar bebas ini, dipastikan akan membuka alur lalu lintas barang dan jasa serta pasar semakin lebar. Karenanya, pertumbuhan ekonomi regional harus terintegrasi dengan ekonomi global. Dengan demikian, semua sektor industri dan jasa nasional memerlukan kesamaan pandang dalam melihat pertumbuhan ekonomi regional. Dengan kesamaan pandang regional itu, diharapkan dapat menetapkan rencana, strategi, sasaran yang tepat bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

Pada Konperensi Tingkat Tinggi ke-27 di Kuala Lumpur Malaysia tanggal 22 Nopember 2015 yang lalu, para pemimpin negara-negara ASEAN telah mendeklarasikan berdirinya Masyarakat ASEAN 2015 pada tanggal 31 Desember 2015. Deklarasi tersebut ditandai dengan dilakukan penandatanganan Deklarasi Kuala Lumpur 2015 yang berisi tentang Berdirinya Masyarakat ASEAN dan Deklarasi Kuala Lumpur untuk ASEAN 2025 Maju Bersama-Sama. *Blue print* Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015



mencakup empat aspek, yaitu pasar tunggal dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pembangunan ekonomi yang merata, dan integrasi ke dalam ekonomi global. Sebenarnya cetak biru tersebut telah disiapkan sejak tahun 2007 dan sudah mencapai 92 %, sedangkan target yang belum tercapai pada tanggal 31 Desember 2015 dialihkan pada cetak biru MEA 2025.

Berlakunya Deklarasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tinggal menunggu hari dalam hitungan jari ini, sudah barang tentu menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Salah satu pilar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bahwa ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi regional yang didukung oleh elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. Dengan adanya arus bebas tenaga kerja terampil dapat dipastikan akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara dari negara-negara ASEAN, karena dapat keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan di negara yang dituju. Kunci keberhasilan dalam implementasi deklarasi Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut adalah disiapkan sumber daya manusia, pengembangan riset dan teknologi melalui pendidikan yang berkualitas terutama jenjang pendidikan tinggi. Negara Indonesia perlu meningkatkan produktifitas dan kualitas produk barang dan jasa untuk tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berorientasi pada pasar ekspor terutama ke negara-negara ASEAN. Tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana pendidikan tinggi menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing pada era global.

### C. **DAYA SAING BANGSA ERA GLOBAL**

Globalisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan antar negara, antar bangsa, antar budaya tanpa mengenal batas geososial politik maupun geososial ideologis. Seluruh dunia dan bangsa seolah-olah menjadi satu dan saling berkaitan erat tanpa mengenal batas yang jelas. Terjadinya globalisasi tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta bidang sosial budaya. Globalisasi adalah proses perubahan yang terjadi di seluruh dunia dalam berbagai aspek kehidupan manusia yang tidak mengenal batas negara, bangsa, dan sosial budaya. Perubahan itu terjadi dengan sangat cepat karena adanya kemajuan dalam bidang IPTEKS seperti teknologi informasi dan komunikasi yang telah berhasil di negara maju. Ciri-ciri globalisasi adalah : terjadi interdependensi antar bangsa secara global, baik bidang sosial, ekonomi, dan kultural, terjadi persaingan antar bangsa dalam segala bidang, lahir bangsa unggul dan mampu menarik keuntungan dan bangsa lemah dan menderita, timbul homogenisasi dalam pandangan, ideologi, perilaku, selera, akibat efektifnya TIK.

Moetojib (1994) menyatakan bahwa globalisasi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bangsa, baik bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positif dari globalisasi adalah (a) mudah menyerap nilai positif budaya lain yang lebih maju; (b) mendorong masyarakat untuk mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang; (c) mendorong terwujudnya masyarakat yang modern di kemudian hari; (d) meningkatnya solidaritas internasional; (e) meningkatnya pengetahuan masyarakat terutama dalam bidang IPTEKS; dan (f) mudah menerima informasi perkembangan global. Sedangkan aspek negatifnya adalah : (a) masuknya nilai-nilai negatif dari bangsa lain yang sudah maju; (b) informasi tentang kemajuan negara lain dapat memunculkan kekurangpuasan masyarakat; (c) timbul gaya hidup mewah, konsumtif, hedonisme yang dapat menimbulkan disorientasi terutama di masyarakat desa; (d) Pengaruh media cetak dan elektronik dapat merusak moral masyarakat; dan (e) tingkat pendidikan masyarakat yang belum merata menyebabkan terjadi perbedaan tingkat kesiapan mereka dalam menerima dan mencerna informasi .

Sumber daya manusia pada era globalisasi dituntut mempunyai ciri mampu beradaptasi dengan lingkungan yang mengglobal, yaitu (1) Manusia yang mampu bergaul dan mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik (a) menguasai bahasa yang digunakan dalam forum internasional; (b) memiliki sikap toleransi dan menghormati antar bangsa, budaya, dan menjauhkan dari diskriminasi; (c) mampu memanfaatkan sarana dan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Manusia yang memiliki daya seleksi dan antisipasi yang tinggi. Agar tidak dilanda oleh ketidakpastian dan perubahan akibat



perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, diperlukan manusia yang mampu “membaca” dan memanfaatkan situasi jika mereka dihadapkan dengan problem perubahan sosial yang baru. (3) Manusia yang tangguh dalam persaingan. Hubungan antar bangsa didukung oleh mobilitas penduduk antar negara sehingga menimbulkan persaingan di berbagai bidang kehidupan. Untuk itu diperlukan manusia yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Buchory : 1994).

Pembahasan mengenai daya saing bangsa, maka tidak dapat dipisahkan dengan produktivitas bangsa yang bersangkutan. Produktivitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kebiasaan atau perilaku dan keterampilan sumberdaya manusia (SDM). Kebiasaan atau perilaku dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama atau kepercayaan, sedangkan keterampilan ditentukan oleh kemampuan memahami, mengembangkan, mengendalikan dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Apa prasyarat yang harus dipenuhi dan bagaimana caranya untuk meningkatkan produktivitas? Prasyaratnya adalah bangsa tersebut harus merdeka (independent) dan memiliki kebebasan (freedom).

BJ Habibie (2014) mengemukakan bahwa sejak kemerdekaan bangsa Indonesia berusia 53 tahun dan memasuki era reformasi pada tanggal 21 Mei 1998, kualitas kebebasan yang berbudaya dan bertanggungjawab dapat secara sistematik dimulai. Satu setengah tahun sebelum memasuki Milenium, yaitu pada saat teknologi informasi bersama proses globalisasi sangat mempengaruhi kualitas kerjasama masyarakat di berbagai belahan dunia, negara Indonesia telah memenuhi prasyarat untuk peningkatan produktivitas suatu Bangsa, yaitu: merdeka dan bebas. Pada hakekatnya di dalam kehidupan ini, proses pembudayaan sudah dimulai sejak seorang bayi berada dalam kandungan dan setelah seorang manusia lahir ke dunia. Proses pembudayaan dilanjutkan dalam pergaulan di lingkungan keluarga (pendidikan informal), lingkungan pendidikan sekolah (pendidikan formal), dan lingkungan masyarakat (pendidikan non formal).

Setelah proses nilai tambah pribadi melalui jalur pembudayaan dan jalur pendidikan simultan selesai dilaksanakan, maka prasyarat SDM siap pakai dipenuhi dengan cara SDM mengalami proses “Pengunggulan” (“Pemahiran”) dengan cara memasuki “dunia kerja” yang nyata, agar mereka dapat lebih meningkatkan keterampilan, produktivitas dan daya saing sehingga menjadi SDM yang unggul di bidangnya. Lebih lanjut menurut BJ Habibie (2014) Proses “Pengunggulan” atau “Pemahiran” tersebut hanya dapat diberikan melalui lapangan kerja pada perusahaan yang membutuhkan keterampilan menerapkan teknologi tepatguna dengan produktivitas yang tinggi sesuai hasil proses pendidikan dan pembudayaan SDM yang bersangkutan.

Tingkat daya saing bangsa Indonesia pada era globalisasi ini masih belum menggembirakan, karena berdasarkan hasil survei lembaga internasional peringkatnya masih relatif di bawah. Peringkat Indonesia menurut “World Talent Report 2015” yang diumumkan di Singapura pada tanggal 17 Nopember 2015 yang lalu berada pada urutan ke-41 dari 61 negara yang disurvei. Survei yang melibatkan 4000 eksekutif dari 61 negara termasuk dari Indonesia tersebut dilakukan oleh *Institute of Management Development*, yaitu sebuah lembaga pendidikan bisnis ternama yang berkedudukan di Lausanne Swiss yang hasilnya menunjukkan peringkat yang rendah bagi pengembangan sumber daya manusia terutama tenaga terampil di Indonesia (Kompas, 23 Nopember 2015).

Hasil survei tersebut sudah barang tentu mengejutkan berbagai pihak, karena peringkat daya saing bangsa Indonesia turun 16 tingkat jika dibandingkan dengan peringkat tahun 2014 yang lalu. Peringkat Indonesia memang sedikit di atas India dan Brasil, namun demikian berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Faktor penyebab rendahnya daya saing Indonesia tersebut sejalan dengan adanya pelambatan ekonomi dan rendahnya serapan anggaran negara baik yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Posisi peringkat Malaysia juga mengalami penurunan disebabkan oleh pelambatan ekonomi dan munculnya gejolak politik beberapa waktu yang lalu

Sesuai dengan hasil survei tersebut, bagi negara yang berada pada peringkat yang tinggi menunjukkan optimisme bahwa negara tersebut dapat mempertahankan dan bahkan mampu



meningkatkan pertumbuhannya. Sementara bagi negara yang peringkatnya berada pada posisi rendah menunjukkan bahwa negara tersebut tidak mempunyai daya saing yang memadai untuk menghadapi tantangan dan persaingan ekonomi dunia. Keberadaan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi (talent) sangat dibutuhkan perannya dalam situasi dunia yang berubah dengan sangat cepat. Peran sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas sangat penting karena diyakini akan mampu mencari solusi mengatasi situasi yang sulit pada era globalisasi.

Landasan yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan oleh Institute of Management Development adalah tiga kategori, yaitu faktor investasi dan pengembangan, faktor daya tarik, dan faktor kesiapan. Yang dimaksud dengan faktor investasi dan pengembangan disini meliputi besaran belanja pemerintah terhadap sektor pendidikan, terutama pendidikan sekundair. Faktor ini juga menghubungkan kesempatan pekerja dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan kemampuannya. Faktor daya tarik meliputi biaya dan kualitas hidup, motivasi pegawai, dan kemampuan mempertahankan pegawai terampil untuk tetap bekerja di tempat yang sama. Sementara itu faktor kesiapan meliputi ketersediaan pegawai terampil, keterampilan bahasa dan bidang keuangan, serta kesejahteraan pegawai, seperti standar gaji, bonus, dan insentif lainnya.

#### **D. PERAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA**

Sejak bangsa Indonesia memasuki era reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 yang lalu, telah dilakukan empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen, maka dasar pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pendidikan tinggi menjadi lebih jelas landasan yuridisnya secara konstitusional. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 28 C UUD 1945 pasca amandemen yang menegaskan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Kemudian pada pasal 31 UUD 1945 juga dilakukan amandemen dengan merubah nomenklatur "pengajaran" menjadi "pendidikan" yang mengandung perbedaan makna yang sangat mendasar. Hak warga negara dalam bidang pendidikan diatur pada Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Pada ayat (4) dijelaskan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah". Selanjutnya pada ayat (5) dijelaskan bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia".

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia. Sementara yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia berfungsi untuk (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui Tridharma; (c) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan humaniora. Termasuk tujuan pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membentuk akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Dengan berlandaskan pada ketentuan yuridis yang ditegaskan di atas, dapat dimaknai bahwa pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pendidikan tinggi di Indonesia sudah barang tentu tidak untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara semata, melainkan juga diharapkan mampu menghasilkan berbagai produk teknologi dan inovasi serta sumber



daya manusia yang terampil sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Bahkan lebih dari itu keberhasilan pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan pendidikan tinggi juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Pada hakekatnya pendidikan tinggi di Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa, dengan tugas pokok seperti terangkum dalam Tridharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 2015 – 2019 dinyatakan terkait dengan aspirasi masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pendidikan tinggi. Perkembangan situasi perekonomian dunia yang berkembang ke arah pasar bebas dan pengintegrasian perekonomian menuntut negara Indonesia untuk meningkatkan daya saing secara terus menerus dengan memanfaatkan berbagai keunggulan yang dimiliki. Oleh karena itu masyarakat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pendidikan tinggi dituntut untuk meningkatkan dan memperkokok daya saing ekonomi nasional dengan program-program yang lebih nyata dan komprehensif. Pemerintah juga menaruh harapan yang sangat besar agar ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pendidikan tinggi dapat memberikan sumbangan dalam menjawab kebutuhan teknologi nasional, menciptakan lapangan kerja berbasis teknologi, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta dapat menyiapkan teknologi yang diperlukan baik oleh perusahaan maupun masyarakat pada umumnya.

Sejak awal berdirinya pendidikan tinggi di Indonesia, masyarakat menaruh harapan yang sangat besar terhadap peran perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa dan negara. Masyarakat berharap agar pendidikan tinggi dapat berperan sebagai *agent of education*, dan setelah harapan tersebut dapat terpenuhi maka harapan masyarakat berkembang lagi agar pendidikan tinggi dapat berperan sebagai *agent of research and development*. Harapan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pendidikan tinggi tidak bersifat statis tetapi sangat dinamis. Karena pada saat ini masyarakat berharap agar pendidikan tinggi dapat berperan penting dalam memposisikan diri sebagai *agent of knowledge and technology transfer*. Bahkan pada akhirnya, masyarakat sangat berharap agar perguruan tinggi dapat berperan sebagai *agent of economic development*.

Agar dapat memenuhi harapan masyarakat untuk menjadi agen pengembangan dan pembangunan ekonomi, sudah barang tentu pendidikan tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kendatipun selama ini belum dilakukan identifikasi terkait dengan peran pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, namun sebenarnya sudah banyak hasil-hasil riset atau penelitian perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Pengintegrasian fungsi pendidikan tinggi dengan fungsi riset dan teknologi akan dapat membuat kebijakan nasional menyatu untuk mengembangkan penelitian, termasuk penelitian di perguruan tinggi yang utuh dari hulu sampai hilir yang pada akhirnya dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat dan dunia industri. Dengan adanya pengintegrasian ini, maka potensi pendidikan tinggi di Indonesia dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan industri akan menjadi semakin besar.

Untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi, terdapat dua *direct core element* yang harus ditingkatkan, yaitu inovasi dan tenaga kerja terampil. Dua *direct core element* tersebut didukung oleh *indirect core element*, yaitu penelitian dan pengembangan serta didukung pula oleh dua *supporting element*. Ke dua *supporting element* tersebut adalah lembaga yang berkualitas dan sumber daya yang berkualitas. Untuk meningkatkan indeks daya saing di Indonesia, maka *direct core element*, *indirect core element*, dan *supporting element* harus dapat diwujudkan dan saling mendukung satu sama lain (Renstra Kemenristekdikti, 2015-2019).

Kualitas lembaga pendidikan tinggi di Indonesia sebagai elemen pertama masih relatif rendah jika dilihat dari akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), baik akreditasi program studi apalagi akreditasi institusi. Menurut data BAN-PT bulan Desember 2014, jumlah perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta ada 4.274 buah yang tersebar di Jawa 2.068 perguruan tinggi dan 2.206 perguruan tinggi diluar Jawa. Dari data perguruan tinggi tersebut,



yang di Jawa 93 perguruan tinggi sudah terakreditasi institusi dengan predikat A (19), B (44), dan C (30), sedangkan yang belum terakreditasi sebanyak 1.975 perguruan tinggi. Sementara perguruan tinggi di luar Jawa yang sudah terakreditasi institusi ada 71 buah dengan predikat A (2), B (25), C (44), sedangkan yang belum terakreditasi institusi ada 2.135 perguruan tinggi. Secara total jumlah perguruan tinggi yang sudah terakreditasi institusi 164 buah dengan perincian peringkat A (21), B (69), dan C (74), sehingga sebanyak 4.110 perguruan tinggi di Indonesia belum terakreditasi institusi. Data terakhir BAN-PT pada Nopember 2015 menunjukkan peningkatan, karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang telah terakreditasi institusi sebanyak 852 buah, dengan perincian sebagai berikut : Peringkat A (26 atau 3,05 %), B (240 atau 28,17 %), dan peringkat C (586 atau 68,78 %).

Kondisi objektif elemen yang ke dua yaitu sumber daya yang berkualitas juga masih rendah. Negara Indonesia membutuhkan tenaga terampil dari berbagai profesi apalagi memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah akan berlaku mulai awal tahun 2016. Pada saat itu kebutuhan tenaga terampil menjadi sangat mendesak dan tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan kesulitan untuk bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat dalam memperoleh pekerjaan. Bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin bersaing di luar negeri negara-negara ASEAN dituntut memiliki sertifikat profesi yang tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga diakui oleh negara lain.

Pendidikan tinggi di Indonesia belum sepenuhnya mampu melahirkan alumni yang berkualitas dan profesional. Kualitas dan profesionalitas serta relevansi alumni pendidikan tinggi mencakup tiga hal, yaitu (a) akademik skills yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi; (b) generic/live skills yang mengacu pada serangkaian dan jenis-jenis keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan yang dapat diterapkan di lapangan kerja; (c) *technical skills* yang berhubungan dengan profesi spesifik yang memerlukan pengetahuan dan keahlian agar dapat berkerja cerdas dan profesional. Arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan Renstra Kemenristekdikti 2015 – 2019 mencakup : (1) meningkatkan kualitas perguruan tinggi; (2) meningkatkan relevansi dan daya saing perguruan tinggi; (3) meningkatkan dan pemerataan akses perguruan tinggi; (4) meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK); dan (5) meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

Agar pendidikan tinggi dapat berkontribusi dalam membangun daya saing bangsa, maka perguruan tinggi tersebut harus dalam kondisi sehat. Menurut Naim (2015), kesehatan perguruan tinggi dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut : (1) Memiliki keabsahan Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Swasta (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, ormas); (2) Program studi dan perguruan tinggi memiliki izin pendirian dan telah terakreditasi; (3) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (4) Memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sesuai dengan Pernendikbud nomor 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, (5) Memiliki Statuta dan Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi, (6) Tidak sedang konflik internal, baik antar organ Badan Penyelenggara maupun Badan Penyelenggara dengan perguruan tinggi, ataupun antar berbagai pihak di dalam perguruan tinggi, (7) Tidak melakukan kegiatan pembelajaran di luar domisili, seperti yang diatur dalam Pernendikbud No 20/2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi, dan tidak menyelenggarakan kelas yang dipadatkan menjadi 2 hari per minggu, (8) Melaporkan seluruh data dan informasi tentang perguruan tinggi serta pelaksanaan dan luaran SPMI pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Dalam upaya berkontribusi meningkatkan daya saing bangsa, perguruan tinggi di samping menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga harus kompeten dalam bidang ilmunya sesuai dengan program studinya masing-masing. Perguruan tinggi perlu mengambil langkah untuk memberikan kepastian bahwa kurikulum yang didesain adalah relevan dengan kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang. Perguruan tinggi juga perlu membangkitkan suasana akademik yang mampu meningkatkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan,



teknologi, dan seni. Proses pembelajaran di perguruan tinggi juga perlu disesuaikan dengan upaya mendekatkan bidang ilmu yang dipelajari dengan profesi mahasiswa setelah mereka lulus.

Pada era globalisasi dan mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, sudah barang tentu alumni pendidikan tinggi akan makin banyak yang bekerja di luar negeri terutama di negara-negara ASEAN. Dalam kondisi yang demikian, maka kompetensi lulusan perguruan tinggi akan sangat menentukan peran mereka di era global. Menghadapi perubahan yang demikian cepat, maka lulusan yang berkualitas dan kompeten dan paling siap menghadapi ketidakpastian, mereka lah yang memiliki kesempatan untuk memenangkan persaingan. Pendidikan tinggi dituntut cepat tanggap dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan yang akan terus terjadi. Kompetisi dan pemberian layanan yang berkualitas, menjadi tantangan dan peluang bagi perguruan tinggi untuk melakukan perubahan internal agar tetap mampu mempertahankan dan merebut kepercayaan masyarakat .

Perguruan tinggi dapat memilih empat pilihan skenario antara perluasan akses dan peningkatan mutu (Suhardiyanto : 2015). Ke empat pilihan tersebut adalah (a) akses sempit dan mutu rendah, (b) akses luas dan mutu rendah, (c) akses sempit dan mutu tinggi, dan (d) akses luas dan mutu tinggi. Pilihan pada skenario pertama, dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik ketentuan dalam Pembukaan maupun pada Batang Tubuhnya. Pilihan kedua, yakni membuka akses yang seluas-luasnya tanpa memperhatikan kualitas merupakan pilihan yang tidak bertanggung jawab, karena perguruan tinggi ini menghasilkan lulusan dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak berkualitas dan kompetensinya rendah. Pilihan ke tiga, mencapai mutu yang tinggi dengan akses yang sempit. Hal ini berakibat kalau perguruan tinggi menggantungkan pendanaan dari mahasiswa, maka hanya dapat diakses oleh sekelompok anak bangsa yang beruntung secara ekonomi saja. Pilihan yang ke empat dipandang paling tepat, yaitu dengan aksesnya luas disertai mutu yang tinggi. Pilihan ini sejalan dengan tujuan para pendiri republik ini sebagaimana dituangkan pada alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, terutama berkenaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa di era global, kurikulum pendidikan tinggi perlu dikembangkan secara periodik agar senantiasa sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Budaya penelitian dan inovasi perlu dikembangkan sehingga perguruan tinggi perlu melakukan transformasi dari *teaching university* menjadi *research based university* bahkan menjadi *interpreneurial university*. Sebagai konsekuensinya maka perguruan tinggi harus mampu membangun jejaring dan berkolaborasi untuk melaksanakan penelitian sehingga dapat diwujudkan sistem pendidikan dan sumber belajar berbasis riset. Di samping itu hasil-hasil penelitian juga harus diabdikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika proses dan siklus pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dapat berlangsung secara berkualitas oleh semua perguruan tinggi di Indonesia, maka akan makin meningkat kontribusinya dalam meningkatkan daya saing bangsa di era global.

Konsep pendidikan tinggi masa depan dari segi konten Ilmu Pengetahuan menurut Kamaluddin, (2014) bahwa (a) Ilmu yang dikembangkan harus bervariasi; (b) Mahasiswa tidak hanya mempelajari disiplin ilmu yang menjadi fokus sesuai dengan program studinya, tetapi mereka juga mempelajari ilmu pengetahuan lain untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan; (c) Dengan keilmuan yang multidisipliner, mahasiswa akan mampu menemukan inovasi-inovasi baru yang kreatif bagi kehidupan; (d) Ilmu pengetahuan harus bisa diakses secara online oleh civitas akademika dimanapun (anywhere) dan kapanpun (anytime). Di samping itu strategi perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing bangsa di era global adalah perlu (a) membuka diri dan menjalin kerjasama antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri untuk memperkuat institusi; dan (b) mengintegrasikan dengan Information, Communication, and Technology (ICT).

Universitas PGRI Yogyakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, berupaya meningkatkan kualitas lulusannya agar berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa pada era global. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti visinya **“UPY pada tahun 2030 menjadi perguruan tinggi yang unggul, menghasilkan lulusan yang bertaqwa, kompetitif, profesional, memiliki komitmen nasional dan berwawasan global”**. Motto Universitas PGRI Yogyakarta adalah



“gerbang sukses kompetisi masa depan”. Untuk mewujudkan visi dan motto UPY tersebut, ditetapkan rencana strategis dalam jangka waktu lima tahunan yang masing-masing memiliki fokus pengembangan image pada skala yang berbeda. Selanjutnya juga ditetapkan pola ilmiah pokok, yaitu “**mengembangkan pendidikan unggul berbasis budaya**” dan mengembangkan nilai-nilai yang dikemas dalam akronim KARAKTERKU. Karakterku merupakan akronim dari K (keimaan dan ketaqwaan), A (amanah atau kejujuran), R (rasa nasionalisme dan patriotisme), A (akademikus atau cerdas dan kompetitif) K (kemanusiaan atau humanisme), T (terbuka dan adil), E (empati dan tangguh), R (rukun dan musyawarah), K (kebinnekaan dalam persatuan), dan U (Universitas PGRI Yogyakarta).

Berbagai program yang telah dirancang dan berjalan untuk mewujudkan peran Universitas PGRI Yogyakarta dalam meningkatkan daya saing lulusan, misalnya semua program studi telah menetapkan dan melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi mengacu KKNI. Semua mahasiswa harus mengikuti DAT Program, yaitu program (*Desktop Application Test*) dengan lisensi dari Microsoft dan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Semua mahasiswa diwajibkan mengikuti tes TOEFL ITP yang skor hasilnya diakui secara internasional. Program *Entrepreneurial management & Bussines Plan* dan Bursa Efek Indonesia. Demikian pula bagi mahasiswa calon guru di lingkungan FKIP UPY juga diwajibkan mengikuti dan wajib lulus Kursus Mahir Dasar Kepramukaan serta kursus Kepalangmerahan, dan sebagainya.

#### E. CATATAN AKHIR

Pengalaman pembangunan berbagai negara menunjukkan bahwa naiknya Indonesia dalam Kelompok Negara Berpendapatan Menengah memang masih bisa diandalkan pada kekayaan alam yang melimpah dan besarnya pasar konsumen yang dimiliki di dalam negeri. Namun begitu tiba pada dinding pembatas masuk ke Kelompok Negara Berpendapatan Tinggi maka faktor kapasitas dan daya saing bangsa menjadi dominan.

Untuk menghadapi kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 disiapkan pada tingkat *kemampuan* dan keahlian dalam Pendidikan Tinggi bukan pada pendidikan dasar. Karena Perguruan Tinggi merupakan bagian dalam peningkatan ekonomi. Maka desain kurikulum akan mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan sektor swasta dan juga produk yang dihasilkan. Mulai 1 Januari 2016 kesepakatan kerjasama antar negara anggota ASEAN akan terwujud dengan terbentuknya efektif Masyarakat Ekonomi ASEAN, termasuk kerjasama di berbagai bidang profesi antar negara anggota. Lapangan profesi kini terbuka juga bagi tenaga profesional negara anggota ASEAN. Kenyataan ini mengharuskan kita untuk memiliki keunggulan daya saing yang bisa menandingi negara anggota ASEAN. Untuk inilah peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi menjadi urgen.

Untuk meningkatkan peran pendidikan tinggi dalam berkontribusi *menghasilkan* lulusan yang memiliki daya saing bangsa di era global, diperlukan kerja keras dalam waktu yang cukup. Reformasi pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan dengan belajar pada negara lain yang sudah berhasil membangun reputasi pendidikan tinggi nya di tingkat global.

#### F. DAFTAR PUSTAKA

- Bacharuddin Jusuf Habibie. 2014. Pendidikan dan daya saing bangsa. *Pidato Kunci pada Konvensi Pendidikan PGRI*. Jakarta 18 Pebruari 2014.
- Buchory MS. 1994. Tantangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam Era Globalisasi, *Pidato Dies Natalis IKIP PGRI Yogyakarta*. 10 Desember 1994.
- Buchory MS, dkk. 2011. *Penyiapan Sarjana Kompetitif dan Berkarakter Indonesia* (Model Pendidikan Karakter di Universitas PGRI Yogyakarta).



- Kamaluddin, LM. 2014. Peranan Perguruan Tinggi dalam Membangun Ekonomi di Era Asia. Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Pleno Konvensi Kampus X dan Temu Tahunan XVI Forum Rektor Indonesia (FRI) di UNS Surakarta 30 Januari 2014.
- McKinsey Global Institute (MGI). 2012. *Perekonomian Nusantara : Menggali potensi terpendam Indonesia*. McKinsey & Company.
- Moetoyib. 1994. *Keynote Speech Gubernur Lemhanas* dalam seminar Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi di UGM 16 Nopember 1994.
- Naim, Ainun. 2015. Outlook 2016 Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Materi Kuliah Umum di Universitas PGRI Yogyakarta*, 27 Mei 2015.
- Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 - 2019, Jakarta : Kemristekdikti.
- Suhardiyanto H. 2015. Strategi pengembangan Perguruan Tinggi untuk Mewujudkan insan unggul dan berdaya saing global. *Pidato Dies Natalis ke 51 Universitas Negeri Yogyakarta*. 21 Mei 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen. Jakarta. Sekretariat Negara. 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung : Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bandung : Citra Umbara.
- Surat Kabar Harian Kompas, tanggal 23 dan Tanggal 25 Nopember 2015.